

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

UMKM berperan penting dalam menyumbang perekonomian seperti dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan pekerjaan, mengurangi tingkat kemiskinan, hingga peningkatan sasaran-sasaran sosial dalam pembangunan ekonomi (Ayu & Dewi, 2021). UMKM memiliki peran vital dalam mendorong perekonomian perkembangan negara, diantaranya dengan memberikan kontribusi terhadap PDB dan lapangan pekerjaan. Namun di tengah kontribusi sentral yang diberikan ini, UMKM masih menghadapi beberapa hambatan seperti aksesibilitas terhadap lembaga-lembaga pembiayaan formal yang masih sulit (Hasibuan & Marliyah, 2024). Berdasarkan survey yang dilakukan oleh DSInnovate tahun 2022 yang merupakan lembaga riset swasta berbasis teknologi di Indonesia, diperoleh beberapa hambatan yang dialami UMKM.

Tabel 1. 1 Kendala yang Dihadapi UMKM

KENDALA YANG DIHADAPI	PERSENTASE
Pemasaran Produk	70,2%
Akses terhadap Modal	51,2%
Pemenuhan/Ketersediaan Bahan Baku	46,3%
Adopsi Digital/Teknologi	30,9%
Proses Transaksi	30,8%
Manajemen Arus Kas	24,3%
Lainnya	1,7%

Sumber : MSME Empowerment Report, 2022.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa kendala mengenai akses terhadap modal menempati persentase tertinggi kedua yang menandakan bahwa masalah pembiayaan terhadap UMKM merupakan masalah yang sedang krusial saat ini. Menurut (Setyawati, 2021), ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan mengapa sektor UMKM mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses permodalan. Pertama, adanya kesulitan dan keterbatasan dalam mengakses lembaga keuangan formal. Keterbatasan ini muncul karena ketika mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan, pelaku usaha tidak memiliki asset yang dapat digunakan sebagai jaminan. Kedua, yaitu karena pendapatan yang cenderung fluktuatif dan tidak stabil sehingga menyebabkan pelaku usaha kesulitan dalam mengelola dana operasionalnya.

Kondisi ini juga semakin diperkuat oleh adanya data dari Otoritas Jasa Keuangan tahun 2024 mengenai Roadmap Pengembangan dan Penguatan Lembaga Keuangan Mikro, diketahui bahwa pembiayaan terhadap UMKM masih mengalami keterbatasan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, total kebutuhan pembiayaan UMKM secara nasional diperkirakan mencapai Rp1.605 triliun, namun lembaga keuangan formal hanya mampu memenuhi sebesar Rp820 triliun, sehingga terdapat kesenjangan (*gap*) sebesar Rp785 triliun. Selanjutnya, pada tahun 2020 kebutuhan meningkat menjadi Rp1.735 triliun, sedangkan pembiayaan yang tersedia hanya Rp861 triliun, menyisakan kesenjangan sebesar Rp874 triliun. Adapun di tahun 2021, kebutuhan UMKM mencapai Rp1.818 triliun dengan pembiayaan yang tersedia sebesar Rp956 triliun, sehingga menyisakan *gap* sebesar Rp862 triliun. Data tersebut memperlihatkan bahwa meskipun pembiayaan dari lembaga formal terus meningkat, namun nyatanya belum mampu mengimbangi

permintaan pembiayaan dari UMKM secara proporsional. Sehingga dengan adanya ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan pembiayaan tersebut menunjukkan adanya celah pembiayaan yang mendorong banyak pelaku UMKM untuk mencari sumber pembiayaan atau permodalan lain, salah satunya yang berasal dari lembaga informal.

Sebagai salah satu provinsi dengan kontribusi besar dalam sektor UMKM, Bali juga menghadapi tantangan serupa terkait keterbatasan akses pembiayaan yang ditunjukkan dengan peningkatan jumlah UMKM di setiap kabupaten. Jumlah UMKM yang terus bertambah ini menunjukkan tingginya kebutuhan akses pembiayaan yang belum sepenuhnya terpenuhi oleh lembaga keuangan formal. Berdasarkan data yang diperoleh dari Satu Data Indonesia Provinsi Bali, terlihat bahwa persebaran UMKM di masing-masing kabupaten menunjukkan variasi yang signifikan.

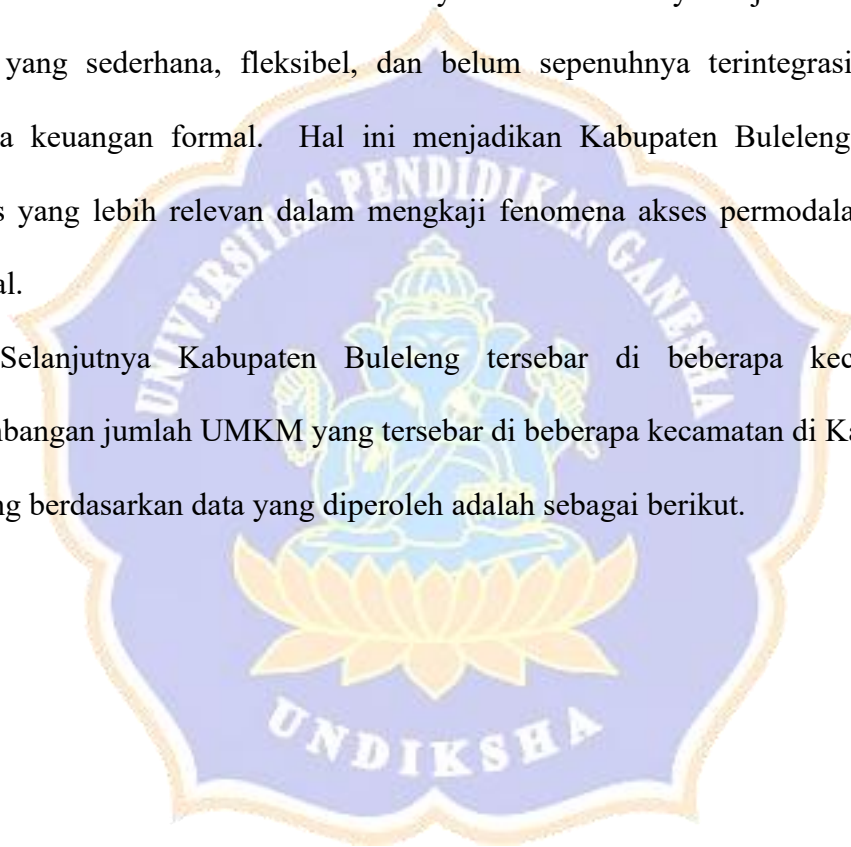
Tabel 1. 2 Data Perkembangan Jumlah UMKM Provinsi Bali Tahun 2023

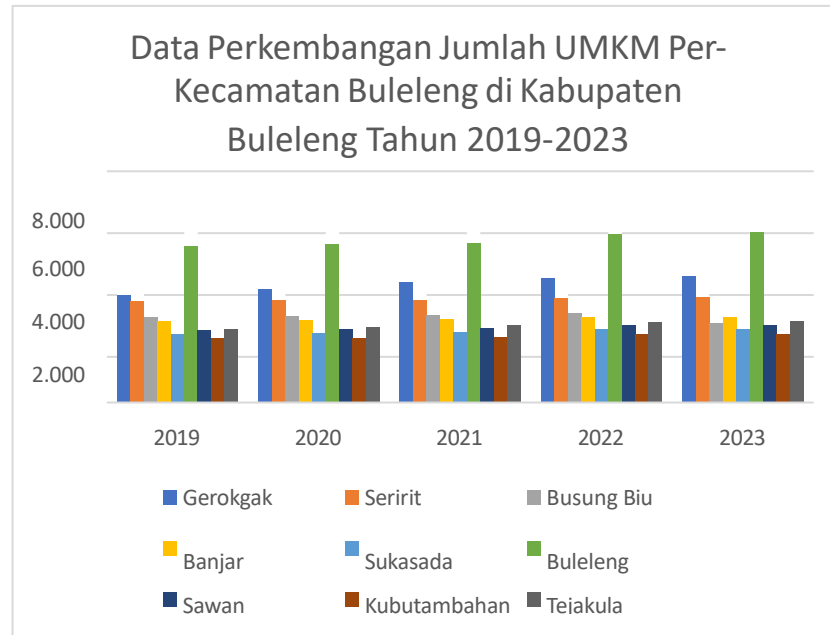
NO	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH UMKM
1	Kota Denpasar	69.491
2	Kabupaten Buleleng	66.870
3	Kabupaten Jembrana	59.745
4	Kabupaten Gianyar	46.924
5	Kabupaten Tabanan	40.867
6	Kabupaten Karangasem	33.057
7	Kabupaten Bangli	29.510
8	Kabupaten Badung	25.925
9	Kabupaten Klungkung	17.295

Sumber: Satu Data Indonesia Provinsi Bali, 2024

Dari Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa Buleleng sebagai salah satu kabupaten dengan perkembangan UMKM yang signifikan setelah Kota Denpasar. Namun berdasarkan data keragaan UMKM Bali Tahun 2023, struktur UMKM khususnya pada sektor perdagangan di Kota Denpasar didominasi oleh UMKM formal. Sementara itu, Kabupaten Buleleng justru sebagian besar masih didominasi oleh UMKM informal. Dominasi UMKM informal di Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa aktivitas usaha Masyarakat masih banyak dijalankan dengan sistem yang sederhana, fleksibel, dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan lembaga keuangan formal. Hal ini menjadikan Kabupaten Buleleng sebagai konteks yang lebih relevan dalam mengkaji fenomena akses permodalan secara informal.

Selanjutnya Kabupaten Buleleng tersebar di beberapa kecamatan.. Perkembangan jumlah UMKM yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Buleleng berdasarkan data yang diperoleh adalah sebagai berikut.





Gambar 1.1 Data Perkembangan Jumlah UMKM Per- Kecamatan Buleleng di Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa UMKM yang tersebar di Kabupaten Buleleng memiliki potensi yang positif secara signifikan dari tahun ke tahunnya dimana Kecamatan Buleleng dengan perkembangan jumlah UMKM tertinggi dan relatif naik secara signifikan. Sehingga, objek penelitian ini difokuskan pada UMKM yang ada di Kecamatan Buleleng. Meskipun perkembangan UMKM di Kecamatan Buleleng cukup signifikan, tidak semua sektor atau pelaku usaha memiliki perkembangan yang merata. Menurut (Randu et al., 2019), salah satu sektor dalam UMKM khususnya pelaku usaha di bidang non formal seperti pedagang rentan dalam menghadapi hambatan berupa akses permodalannya. Mayoritas pelaku usaha sektor non formal memiliki modal yang masih terbatas dalam menunjang kelangsungan usahanya. Kekurangan modal inilah yang terkadang menjadi alasan atau potensi pelaku usaha untuk memanfaatkan akses permodalan.

Banyak jenis permodalan yang saat ini sudah difasilitasi oleh pemerintah, salah satunya dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit Usaha Rakyat merupakan salah satu permodalan yang bisa diakses dengan tingkat suku bunga yang rendah dan memang dikhususkan kepada pelaku usaha kecil. Namun pelaku usaha tidak sepenuhnya memanfaatkan akses permodalan secara formal, karena banyaknya prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Sehingga banyak dari pelaku usaha yang memilih memanfaatkan akses permodalan secara informal (Randu et al., 2019). Kondisi ini juga tercermin pada pasar yang ada di Kecamatan Buleleng. Berdasarkan data yang diperoleh dari Perumda Pasar Argha Nayottama Kabupaten Buleleng, terlihat perkembangan jumlah pedagang pasar yang tersebar di Kecamatan Buleleng per tanggal 2 Juni 2025.

Tabel 1. 3 Data Pasar di Kecamatan Buleleng

NO	NAMA PASAR	JUMLAH PEDAGANG
1	Pasar Anyar	1.458
2	Pasar Mumbul	111
3	Pasar Banyuasri	1.408
4	Pasar Buleleng	235
5	Pasar Kampung Bugis	90
6	Pasar Latri	175
7	Pasar Kampung Tinggi	223
8	Pasar Sukasada	29
9	Pasar Bungkulan	120
10	Pasar Seririt	1.536
11	Pasar DC Seririt	106
12	Pasar Banjar	394
13	Pasar Kuliner Taman Kota	60
14	Pasar Tamblang	90

Sumber: Perumda Pasar Argha Nayottama Kabupaten Buleleng.

Dari Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa jumlah pedagang di Pasar Banyuasri yaitu mencapai 1.408 pedagang dimana menempati posisi ketiga jumlah pedagang terbanyak setelah Pasar Seririt dan Pasar Anyar. Pasar Banyuasri merupakan pasar tradisional dengan berbagai macam komoditas perdagangan serta menjadi penyumbang dalam perekonomian daerah (Ekawati et al., 2021). Setelah resmi dilakukan revitalisasi, Pasar Banyuasri kini dalam tahapan naik kelas menuju modernisasi yang berdampak terhadap literasi dan inklusi keuangan (Mayasari et al., 2023). Pasar Banyuasri dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan pasar tradisional satu-satunya yang ada di Kabupaten Buleleng yang telah melalui proses revitalisasi oleh pemerintah daerah. Revitalisasi pasar tidak hanya dimaknai sebagai perbaikan fisik bangunan, namun juga sebagai langkah transformasi pasar tradisional menuju pengelolaan yang lebih modern, tertata, dan kompetitif.

Melalui proses revitalisasi, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, kenyamanan transaksi, serta profesionalitas aktivitas perdagangan sehingga pedagang diharapkan mampu naik kelas baik dari sisi manajemen usaha, pola transaksi, maupun akses terhadap layanan ekonomi formal. Sehingga, revitalisasi pasar secara konseptual dalam konteks penelitian ini seharusnya dapat mendorong integrasi pedagang ke dalam sistem ekonomi formal, termasuk kemudahan dalam menjangkau lembaga keuangan resmi seperti perbankan dan program pembiayaan pemerintah, salah satunya Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun, kondisi awal di lapangan menunjukkan bahwa meskipun Pasar Banyuasri telah direvitalisasi dan telah menjadi proyek literasi keuangan, pada kenyataannya sebagian besar pedagang masih mengandalkan memanfaatkan akses permodalan informal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara

kebijakan penguatan akses keuangan formal dengan praktik permodalan yang terjadi di lapangan.

Tidak hanya itu, Pasar Banyuasri juga dipilih sebagai lokasi penelitian karena penelitian terdahulu di pasar ini dengan judul “Peningkatan Kinerja Usaha Pedagang Pasar Banyuasri Singaraja Melalui Literasi dan Inkusi Keuangan” oleh (Mayasari et al., 2023) menunjukkan masih rendahnya pemahaman pedagang dalam mengelola keuangan khususnya pada hal pencatatan, pengelolaan modal, dan peminjaman dana. Dalam hal rendahnya pengetahuan pedagang akan peminjaman dana ini berimplikasi langsung terhadap kecenderungan pedagang untuk mengandalkan permodalan informal dalam menjaga keberlangsungan usahanya. Berbeda dengan penelitian di Pasar Anyar dengan judul “Pengaruh Akses Permodalan, Penggunaan Informasi Akuntansi, dan *Locus Of Control* Terhadap Kinerja Keuangan UMKM Pasca Penataan di Pasar Anyar Singaraja” oleh (K. A. Pratiwi, 2024) yang menekankan pada aspek formalitas. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa penelitian di Pasar Banyuasri masih menyisakan celah penting yang belum pernah dikaji. Sehingga, penelitian ini memiliki urgensi untuk dilakukannya penelitian agar mengkaji bagaimana realitas permodalan sektor informal di pasar tradisional.

Keberlangsungan usaha merupakan komponen utama bagi pelaku usaha jika ingin mempertahankan usahanya. Modal merupakan salah satu asset yang dapat berkontribusi positif terhadap keberlangsungan usaha (Dewi & Herawati, 2023). Keberlangsungan usaha diartikan sebagai suatu kondisi dimana pelaku usaha dapat menerapkan cara atau strategi untuk mempertahankan usahanya agar tetap beroperasi secara konsisten (Widayanti et al., 2017). Tindakan atau cara yang

dilakukan oleh para pelaku usaha yang berasal dari orang lain atau yang dipengaruhi oleh faktor eksternal, diantaranya berupa akses permodalan. Dengan adanya peningkatan pemberian kredit yang berasal dari akses permodalan ini, maka akan mampu meningkatkan perkembangan UMKM. Permasalahan mengenai permodalan merupakan permasalahan dasar yang sering dihadapi oleh pelaku usaha, apalagi jika pelaku usaha belum bisa menyiapkan modal secara keseluruhan dan tidak menganggarkan beberapa pengeluaran yang terjadi ke depannya. Sehingga kekurangan modal ini dapat membuat pelaku usaha kesulitan dan berujung tidak bisa melanjutkan aktivitas usahanya seperti semula (Anggara & Purnamawati, 2023). Dalam penelitian ini, faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha pedagang adalah mengenai akses permodalan informal yang digunakan oleh beberapa pedagang di Pasar Banyuasri Singaraja.

Keputusan pedagang dalam memanfaatkan akses permodalan informal tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori atribusi. Menurut (Budyatna, 2015), teori ini menjelaskan bagaimana individu cenderung dalam menilai dan menyimpulkan penyebab dari suatu kejadian berdasarkan atribusi internal atau atribusi eksternal. Dalam konteks pedagang pasar, atribusi internal mencerminkan persepsi pribadi pedagang, seperti pengalaman sebelumnya, kebutuhan mendesak, ataupun kepercayaan terhadap akses permodalan informal. Sementara itu, atribusi eksternal menggambarkan kondisi lingkungan seperti terbatasnya akses ke lembaga keuangan formal. Teori atribusi relevan digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan bagaimana

pedagang menginterpretasikan pilihan permodalan mereka, yang pada akhirnya berdampak pada keberlangsungan usaha.

Berdasarkan observasi awal, peneliti melakukan wawancara langsung terhadap pedagang di Pasar Banyuasri Singaraja sebagai informan. Informan pertama yaitu bernama Ibu Putu Sukreni beliau merupakan pedagang rempah-rempah bermobil yang telah berjualan selama kurang lebih 5 tahun di Pasar Banyuasri. Berdasarkan hasil wawancara, beliau mengatakan bahwa

“Saya sudah memanfaatkan pinjaman ini sebagai akses permodalan informal kurang lebih selama 2 tahun. Saya mengetahui adanya pinjaman ini dari pedagang lainnya sehingga saya mencoba meminjam. Modal awal yang saya pinjam yaitu sebesar 10 juta untuk pencairan dananya itu mudah dan cepat. Sistem pembayaran saya lakukan secara teratur setiap hari mungkin ada libur atau tidak bayar karena dagangan lagi sepi atau sedang tidak berjualan biasanya jika ada hari raya saya libur. Tidak ada perjanjian mengikat atau bagaimana karena hanya berprinsip terhadap komunikasi dan kepercayaan satu sama lain. Untuk buku pencatatan pembayaran itu ada saya yang bawa dan dicatat setiap saya membayar”.

Pernyataan tersebut mencerminkan bagaimana kemudahan prosedur dan fleksibilitas pembayaran menjadikan akses permodalan informal seperti rentenir sebagai pilihan utama pedagang pasar. Keputusan memanfaatkan pinjaman informal didasarkan pada kepercayaan, kemudahan akses, serta kebutuhan modal yang mendesak. Fenomena ini menjadi indikasi awal bahwa persepsi pedagang terhadap akses permodalan informal memegang peranan penting dalam menunjang kelangsungan usaha terutama di kalangan pedagang pasar tradisional yang tidak memiliki akses formal terhadap lembaga keuangan. Adapun fenomena dalam penelitian ini diangkat dari wawancara dan observasi langsung terhadap pedagang di Pasar Banyuasri yang memang sudah memanfaatkan akses permodalan informal ini dengan waktu yang cukup lama. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan

bahwa pedagang memanfaatkan akses permodalan ini untuk mencapai keberlangsungan usahanya. Informan pertama yaitu Ibu Putu Sukreni, beliau mengatakan bahwa:

“Ya waktu itu saya memang lagi butuh modal untuk menambah barang dagangan supaya jualan bisa tetap jalan sehingga saya memilih untuk memanfaatkan akses permodalan informal ini karena cocok dan sudah sepakat jadi saya meminjam sampai sekarang, dari yang awalnya saya menjual dagangan seadanya hanya dengan tempat seperti keranjang dan kampil sekarang saya sudah memiliki mobil pick up jadi saya bisa berjualan di sana dan dapat membawa barang dagangan juga dengan jumlah banyak sehingga saya bisa menjual lebih banyak rempah dan beragam juga dibandingkan sebelumnya jadi sekarang bisa lebih rame. Usaha saya sangat berjalan belakangan ini karena pinjaman ini memang membantu saya jika memiliki kebutuhan mendesak dengan adanya fasilitas kompensasi juga memberikan beberapa tambahan modal juga namun selama ini saya tidak pernah kewalahan atau bagaimana juga dalam membayar kewajiban pinjaman saya”.

Informan kedua yang bernama Ibu Sultanah yang merupakan penjual tahu dan tempe di Pasar Banyuasri, beliau mengatakan bahwa:

“Saya mulai berjualan tahu disini saat COVID-19 masih maraknya sekitar tahun 2020 itu ya pasti waktu itu memang kondisi ekonomi disini juga tidak stabil kadang memang sepi sekali dan pemasukan tidak ada jadi saat itu memang saya sedang menyesuaikan juga dengan kondisi ekonomi saat itu. Selanjutnya pada tahun 2021 itu saya mulai melakukan pinjaman ini sebagai akses permodalan informal sampai sekarang. Memang pada awal peminjaman modal ini sangat membantu usaha saya agar terus berjalan di tengah perekonomian yang tidak stabil. Usaha saya berkembang jadi saya bisa menjual 2 macam tahu dan tempe dan seiring sampai sekarang saya juga masih menggunakan modal ini dengan melakukan kompensasi jika memang saya membutuhkan modal dalam kebutuhan mendesak sehingga berlangsung sampai sekarang. Saya merasa lebih tenang karena tahu bisa pinjam lagi kalau darurat jadi usaha tetep jalan”.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Mananty & Wulandari, 2023) yang berjudul “Akses Pembiayaan Informal Petani Kentang di Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung”. Dalam

penelitian tersebut, objek penelitian terbatas pada petani sebagai pelaku usaha dalam sektor agrikultur yang berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi akses petani terhadap pembiayaan informal. Pada penelitian ini, penulis melakukan penyesuaian untuk menciptakan kebaruan (*novelty*) dimana objek penelitian difokuskan pada pedagang pasar sebagai pelaku usaha dalam sektor perdagangan informal yang memiliki pola pengelolaan usaha dan kebutuhan modal yang berbeda dengan pelaku usaha dalam sektor pertanian. Penelitian ini juga mengkaji persepsi pedagang mengenai akses permodalan informal. Persepsi pedagang terhadap akses permodalan informal menjadi penting untuk diteliti karena pilihan mereka terhadap sumber permodalan tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan akses, tetapi juga oleh bagaimana mereka menilai kemudahan, risiko, serta manfaat yang ditawarkan oleh lembaga informal tersebut. Dalam konteks ini, aspek akuntansi juga berperan karena persepsi pedagang terhadap pencatatan, pengelolaan modal yang diperoleh akan mempengaruhi bagaimana mereka mengambil keputusan keuangan. Kurangnya pemahaman akuntansi dasar juga dapat berdampak pada pengelolaan modal yang tidak optimal, sehingga akan mempengaruhi keberlangsungan usaha pedagang.

Berdasarkan paparan latar belakang sebelumnya, peneliti memutuskan untuk mengangkat judul yaitu **“PERSEPSI PEDAGANG PASAR BANYUASRI MENGENAI AKSES PERMODALAN INFORMAL TERHADAP KEBERLANGSUNGAN USAHA”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan pembahasan pada latar belakang di atas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut.

1. Kendala mengenai akses terhadap modal menempati persentase tertinggi kedua dari data kendala yang dihadapi oleh UMKM yang bersumber dari survei yang dilakukan oleh DSIinnovate. Hal ini menandakan bahwa masalah pembiayaan terhadap UMKM merupakan masalah yang krusial.
2. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan tahun 2024 mengenai Roadmap Pengembangan dan Penguatan Lembaga Keuangan Mikro, diketahui bahwa pembiayaan terhadap UMKM masih mengalami keterbatasan dari tahun ke tahun yang mencerminkan adanya hambatan struktural dalam akses permodalan bagi pelaku UMKM.
3. Berdasarkan data perkembangan jumlah UMKM Provinsi Bali Tahun 2023 terlihat bahwa Kabupaten Buleleng merupakan salah satu wilayah dengan jumlah UMKM terbanyak yaitu sejumlah 66.870 unit usaha dimana masih didominasi oleh UMKM sektor informal. Selain itu, perkembangan UMKM di Kabupaten Buleleng per kecamatan naik secara signifikan dari tahun 2019 – 2023 dimana Kecamatan Buleleng dengan perkembangan jumlah UMKM tertinggi namun tidak semua pelaku usaha memiliki perkembangan yang merata.
4. Berdasarkan data dari Perumda Pasar Argha Nayottama Kabupaten Buleleng, Pasar Banyuasri merupakan salah satu pasar dengan jumlah pedagang terbanyak sehingga ini mencerminkan tingginya aktivitas perdagangan yang terjadi. Selain itu, pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Buleleng secara resmi melakukan revitalisasi pada Pasar Banyuasri. Revitalisasi pasar secara konseptual dalam

konteks penelitian ini seharusnya dapat mendorong integrasi pedagang ke dalam sistem ekonomi formal. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pada kenyataannya sebagian besar pedagang masih mengandalkan memanfaatkan akses permodalan informal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan penguatan akses keuangan formal dengan praktik permodalan yang terjadi di lapangan.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan beberapa masalah yang ditemukan sebelumnya, maka peneliti perlu membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu dengan menganalisis persepsi pedagang Pasar Banyuasri mengenai adanya akses permodalan informal terhadap keberlangsungan usaha pedagang di Pasar Banyuasri, Singaraja, Kecamatan Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana persepsi pedagang Pasar Banyuasri terhadap akses permodalan informal?
2. Bagaimana dampak dari akses permodalan informal terhadap keberlangsungan usaha pedagang Pasar Banyuasri?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui.

1. Persepsi pedagang Pasar Banyuasri terhadap akses permodalan informal
2. Dampak dari akses permodalan informal terhadap keberlangsungan usaha pedagang Pasar Banyuasri

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan digunakan sebagai referensi dalam bidang akademik khususnya dalam akses permodalan informal terhadap pedagang di Pasar Banyuasri yang mempengaruhi keberlangsungan usaha pedagang Pasar Banyuasri.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai bagaimana sistem dan mekanisme akses permodalan informal dan dampaknya terhadap keberlangsungan usaha.

b. Bagi Pelaku UMKM (Pedagang Pasar Banyuasri)

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literasi keuangan pedagang Pasar Banyuasri khususnya mengenai sistem dan mekanisme akses permodalan tidak hanya secara informal namun juga forma yang berkaitan dengan dampaknya terhadap keberlangsungan usaha.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu mengenai mekanisme dari berbagai jenis permodalan.

d. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau rujukan khususnya mengenai persepsi akses permodalan informal terhadap keberlangsungan usaha.

